No. 06 Th. XVIII/Nopember 1995

BERSIH, SEJUK & INDAH
SAPTA PESONA
MULAILAH DARI SINI !
Diterbitkan oleh :
DIREKTORAT JENDERAL PARIWISATA - DEPARTEMEN PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI

SURAT PEMBACA

KKR DAN SMP GUBERNUR DKI SURJADI

Melalui media massa saya ketahui bahwa ada dua macam jalur komunikasi pemerintah DKI Jakarta dengan masyarakat. Pertama, Kunjungan Kerja Rutin (KKR) setiap Jum'at ke wilayah Kelurahan di 5 wilayah Kotamadya DKI Jakarta. Kedua, Silaturrahmi Minggu Pagi (SMP), dengan sasaran yang sama.

Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan komunikasi, saling pengertian dan pemahaman yang sama tentang berbagai hal atas permasalahan yang dihadapi dalam hidup dan kehidupan di DKI Jakarta.

Dengan pemahaman yang sama antara aparat Pemda DKI Jakarta dengan warganya akan dapat saling bahu-membahu memecahkan permasalahan yang dihadapi. Sekaligus meningkatkan kesejahteraan, memberi masukan bagi perencanaan program pembangunan selanjutnya.

Dalam pelaksanaan program komunikasi sosial itu, disertai para pejabat Pemda DKI Jakarta yang terkait dengan mengikutsertakan kelompok sosial yang berprofesi sebagai pengusaha atau warga Jakarta lainnya yang berkecukupan, untuk ikut peduli dan mau membantu warga Jakarta yang kurang mampu, yang pada gilirannya dapat semakin meningkatkan iklim kesetiakawanan sosial diantara warga Jakarta.

Sementara dari jajaran Kelurahan hadir Kepala Kelurahan beserta stafnya, pengurus LKMD/K, tokoh masyarakat, alim ulama, Karang Taruna, ormas pemuda, PKK, Dharma Wanita dan sebagainya.

Dalam setiap kunjungan, Gubernur KDKI Jakarta Surjadi Soedirdja selalu menekankan, agar masyarakat Jakarta lebih taat dan patuh pada semua aturan yang ada, termasuk norma Renstra dan GDN dapat dicapai serta berjalan lancar.

Menyinggung kunjungan kerja tersebut, saya mengusulkan alangkah baiknya Pemda DKI Jakarta memprioritaskan pada kelurahan yang tercatat sebagai Kelurahan IDT dan Ingub.

Semoga usul saya dapat diperhatikan. Terima kasih atas pengertiannya dan juga terima kasih pada Pak Daktur yang telah bersedia memuat surat saya ini.

Rachmat Maulani
Menara Air Manggarai
Jakarta Selatan.

PENEGAK DISIPLIN DILECEHKAN

Kodam Jaya bersama Pemerintah DKI Jakarta bertekad menyukseskan Gerakan Disiplin Nasional (GDN). Sebanyak 15.000 orang kader Penegak Disiplin dengan dibantu 2.000 prajurit diterjunkan ke lapangan. Ini tahap pertama.

Menurut Pangdam Jaya Mayor Jenderal Wiranto, untuk menyukseskan GDN DKI Jakarta, Kodam Jaya membutuhkan lebih kurang 600 ribu kader Penegak Disiplin, dan dukungan 4.000 prajurit. Sementara sebanyak 50.000 rompi telah dipersiapkan bagi kader Penegak Disiplin.

Melalui pengamatan yang saya saksikan sendiri pada hari Senin tanggal 13 November 1995 di bawah jembatan penyeberangan Pasar Poncol Jakarta Pusat, adalah banyak pelecehan oleh sebagian besar kondektur angkutan umum.

Mereka menganggap sepi. Malah ditertawakan sambil mengejek. Peristiwa ini sewaktu para Generasi Muda dari FKPPI yang berompi Penegak Disiplin, menegur kondektur untuk menutup pintu disertai pentungan yang mengunakan kayu atau bahan lainnya.

Baru, setelah prajurit turun tangan, kondektur itu buru-buru tutup pintu. Bahkan hanya sekedar bergerak saja sebagai tanda tutup pintu. Bandel banget, memang.

Namun, apa yang saya lihat, ada juga keganjilannya. Yaitu, kenapa para Penegak Disiplin itu kebanyakan berdiri pada halte bus. Sedangkan para penumpang pada tempat itu akan naik-turun.

Sudah jelas di halte tidak mungkin tutup pintu.

Masa operasinya juga terbatas, yakni sampai jam 09.30 mereka cabut.

Karenanya, saya usulkan agar memberi sanksi yang berat bagi angkutan umum yang bandel, supaya mereka kapok. Harus diingat bahwa Disiplin Nasional adalah dari kita, oleh kita dan untuk kita. Bantulah usaha kader penegak disiplin.

Terima kasih atas perhatiannya.

Salim Said
Kali Baru Timur, Senen
Jakarta Pusat.

DARI REDAKSI

KORP Pegawai Negeri Republik Indonesia atau disingkat Korpri telah memasuki usianya yang ke-24 (29 November 1971-1995). Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, korp ini semakin dewasa dan matang di dalam menempati fungsi dan keberadaannya yang strategis, yaitu sebagai penyelenggara pemerintahan umum dan pelaksana pembangunan, khususnya sebagai administratur pemerintahan, pembangunan dan juga kemasyarakatan. Dalam arti kata yang sesungguhnya, bergulirnya roda pemerintahan yang benar, baik dan penuh kejujuran terletak di pundak mereka ini. Akan sulit dibayangkan apabila anggota Korpri tak mampu melaksanakan fungsinya itu.

Dan kayaknya kita masih bisa berbesar hati bahwa sampai pada usianya hampir seperempat abad ini tentu saja diharapkan seterusnya, dalam sosok fungsinya sebagai pegawai negeri, segalanya masih berjalan baik sesuai fitrahnya, kendatipun boleh jadi belum seluruhnya memuaskan, yang utamanya dirasakan dalam perihal pelayanan umum. Suatu perihal klasik yang selalu dikeluhkan karena menyangkut profesionalitas. "Profesional sebagai suatu sikap terhadap fungsi, peran dan tugas pegawai negeri harus senantiasa ditumbuhkembangkan, melalui berbagai upaya. Karena pada pundak mereka (anggota Korpri, *red*) bertumpu bagian yang besar dan penting penyelenggaraan negara," ujar Ketua Dewan Pembina Korpri, Moh. Yogie SM.

Jika demikian halnya, maka dalam konteks ini tidak bisa dilepaskan dari masalah kualitas sumber daya manusianya. Suatu perihal utama yang tidak bisa dipungkiri bahwa dalam memasuki era globalisasi, sumber daya manusia merupakan faktor yang menentukan, khususnya dalam keberhasilan mengantisipasi dan memasuki era tersebut, yang menurut takaran bakal berlangsung dalam 25 tahun yang akan datang.

Bagi kita, era globalisasi bukan sekadar bermakna persaingan bebas, melainkan dalam keadaan nyata, pengaruhnya akan berdampak luas, tidak hanya bersifat sektoral, tetapi di dalam seluruh aspek kehidupan manusia, khususnya

MEDIA JAYA
dwi bulanan

Penerbit:
Pemerintah DKI Jakarta
STT No.
110/SK/DITJEN PPG/STT/1976
Pelindung:
Surjadi Soedirdja
Drs. M.H. Ritonga
Pembina:
Drs. H. Harun Al Rasyid
Bambang Sungkono, MA.
Pemimpin Umum/Penanggung Jawab:
Soesila Darmoadji
Pemimpin Redaksi:
Z. Nawawi, SH.
Wakil Pemimpin Redaksi
Hasjman, SmHk.
Sekretaris Redaksi:
Haidil Anwar, SH
Dra. Indrayani
Redaktur/Editor Naskah:
H. Umar Hasan Basri, Drs. Vincent Djauhari
Dewan Redaksi:
Drs. H. Lukman Zaini
Reporter:
Drs. R.A. Zulkarnain, Drs. Yuswil Iswantara, Putu AP, Renaldi Nafiani, Syahrul Safei, Pudjiono
Fotografer:
Firmansyah
Desain Grafis dan Produksi :
M. Naim Kamidin, Sukron
Keuangan:
H. Moch. Thamrin
Distribusi:
E. Habson & Rusmadi
Alamat Redaksi:
Jl. Merdeka Selatan No. 8-9 Jakarta,
Telp. 3823246-3845981

dalam bidang inovasi teknologi, serta berbagai reformasi sosial poltik yang mungkin akan terjadi. Akan begitu banyak pengaruh faktor eksternal, yaitu dalam berbagai ragam dan macam perubahan besar dalam bidang teknologi, politik, ekonomi dan sosial. Dan perubahan itu tak cuma terjadi serta terlokalisasi pada suatu tempat, melainkan akan mengimbas tempat-tempat lainnya. Yang tadinya dianggap masalah regional, menjadi global. Di sinilah makna yang sebenarnya tentang globalisasi.

Perubahan yang menyangkut sumber daya manusia, khususnya bagi anggota Korpri, yaitu sebagai sumer daya pemerintah tidak bisa dielakkan, dan semestinya siap menghadapinya serta menjadikannya sebagai tantangan. Maka tak salah apabila Mendagri selaku Ketua Dewan Pembina Korpri Pusat mengingatkan seluruh anggota Korpri untuk ikut memelihara dan memantapkan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Anggota Korpri, dalam melangkah ke depan, perlu mewaspadai pula suhu politik yang tampaknya sudah menghangat menjelang Pemilu 1997. Kewaspadaan ini dimaksudkan agar Pemilu '97 itu sukses. Indikator keberhasilan itu adalah berupa tepatnya waktu pelaksanaan, tertib dan lancarnya seluruh kegiatan dan aman sesuai dengan asas Luber (Langusng, Umum, Bebas, dan Rahasia).

Karenanya, anggota Korpri harus berpikir untuk masa depan dan jangan mudah terpancing oleh situasi sesaat yang sering tampak *glamour* dan memberi kepuasan. Sebaliknya, anggota Korpri harus berusahaa menciptakan suasana yang tetap menjamin tegaknya kesatuan, kesinbamungan pembangunan dan kepemimpinan nasional tetap di tangan Orde Baru. Termasuk paling khusus di dalamnya, agar anggota Korpri mewaspadai bahaya laten komunis dan ektrem lainnya. Kelalaian terhadap hal ini telah terbukti menimbulkan kemunduran di hampir semua aspek kehidupan bangsa.

Dirgahayu Korpri!

Redaksi

LAPORAN UTAMA

KEMITRAAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL DALAM BANGGASUKADESA

Menteri Negara kependudukan dan Ka. BKKBN. Dr. Haryono Suyono bersama Gubernur KDKI Jakarta Surjadi Soedirdja menandatangani Kesepatan Bersama dan memberikan pengahrahan Kemitraan Pembangunan Kota di Gedung Gria Praja Sunter baru-baru ini.

Pembangunan suatu daerah yang terpilih menjadi perkotaan, dalam arti yang luas, dapat dilakukan melalui serangkaian intervensi sosial ekonomi. Suatu daerah yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat setempat, yang sesuai karakteristik dan potensi masyarakat di situ. Jangan sampai intervensi yang dilakukan justru mengundang penduduk baru masuk dan mendorong penduduk setempat keluar dari daerahnya sendiri.

TATKALA digelar penandatanganan acara kesepakatan bersama "Kemitraan Pembangunan Kota-Desa" antara Badan Kerja Sama Antar Kota Seluruh Indonesia (BKS-AKSI) dengan Menteri Negara Kependudukan/Kepala BK-KBN, Gubernur Surjadi Soedirdja mengemukakan, keseimbangan pembangunan antara kota dan desa perlu makin ditingkatkan dalam upaya memacu perkembangan sektor perindustrian dan jasa di desa. Kondisi ini, katanya akan mempercepat pembangunan sosial ekonomi di pedesaan.

Suasana desa dengan sawah dan kerbaunya seperti yang terdapat di Kec. Duren Sawit (Jaktim) ini, dapatkah dipertahankan?

Maksud ini dicanangkan, menurut Gubernur KDKI Jakarta selaku Ketua Dewan Pimpinan BKS-AKSI, dalam upaya mendorong percepatan perkembangan desa rural menjadi desa urban. Kota-kota diharapkan dapat menjadi pemacu pembangunan daerah penyangganya secara serasi dan seimbang, sehingga kehidupan masyarakat desa menjadi semakin modern, mandiri dan sejahtera.

Upaya ini juga diharapkan dapat mengendalikan arus urbanisasi dari desa ke kota, karena kehidupan di desa akan makin menarik dan makin urban. Ia juga memaparkan, Trilogi pembangunan yang telah memberi arahan bahwa sebuah proses pembangunan hendaknya mempertimbangkan aspek pemerataan dan stabilitas di samping aspek pertumbuhan.

Dalam konteks pembangunan perkotaan, aspek pemerataan dapat diterjemahkan sebagai sejauh mana pembangunan perkotaan dapat memberi manfaat bagi daerah sekitarnya. Pemerataan dapat diterjemahkan sebagai sejauh mana pembangunan perkotaan dapat memberi manfaat bagi daerah sekitarnya. Pemerataan semacam ini sesuai arahan GBHN yang menyatakan, dikaitkan dengan pembangunan di wilayah *hiterland*.

Pembangunan suatu daerah menjadi perkotaan, dalam arti luas, dapat dilakukan melalui serangkaian intervensi sosial ekonomi di daerah yang bersangkutan. Aktivitas sosial ekonomi ini bertujuan mempercepat proses pengembangan suatu daerah menjadi daerah perkotaan tanpa harus menunggu "limpahan" aktivitas daerah sekitarnya. Membiarkan masyarakat pedesaan berkembang menjadi daerah perkotaan tanpa harus menunggu "limpahan" aktivitas daerah sekitarnya. Membiarkan masyarakat pedesaan berkembang menjadi masyarakat perkotaan secara alamiah seperti yang telah terjadi selama ini akan membutuhkan waktu yang panjang.

Akibatnya, jelas Surjadi, dalam kurun waktu yang panjang tersebut akan semakin banyak limpahan penduduk dari daerah sekitarnya melalui salah satu aspek dinamika kependudukan berupa migrasi.

Ide yang Baru

Pesatnya pertambahan jumlah penduduk di kota-kota menyebabkan kota memiliki penduduk miskin dalam jumlah yang besar, walaupun selama PJP I jumlah penduduk miskin di Indonesia telah berkurang dengan cepat. Kecepatan peningkatan jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan kecepatan pembangunan kota akan menyebabkan tumbuhnya daerah-daerah kumuh, bertambahnya jumlah pengangguran, meningkatnya angka kejahatan dan masalah-masalah sosial lainnya.

Intervensi pengembangan masyarakat perkotaan dilakukan sedemikian rupa sehingga masyarakat tersebut memiliki ide yang baru, dan yang terpenting pada akhirnya adalah mengalami perbaikan dalam kesejahteraan sosial dan ekonomi.

Intervensi sosial ekonomi yang diperlukan suatu daerah terpilih didasarkan pada kebutuhan masyarakat setempat, yang sesuai karakteristik, potensi dan kebutuhan masyarakat setempat. Jangan sampai intervensi yang dilakukan

justru mengundang penduduk baru masuk dan mendorong penduduk setempat keluar dari daerah tersebut.

Surjadi menekankan bahwa kita harus dapat mengidentifikasi hal-hal apa saja yang dianggap penting dan sangat diinginkan oleh masyarakat setempat. Potensi masyarakat setempat, khususnya yang berkaitan dengan potensi kegiatan ekonomi dan Sumber Daya Manusia (SDM).

Potensi kegiatan ekonomi yang dimaksud berkaitan dengan kemampuan masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa, baik yang dibutuhkan masyarakat setempat maupun masyarakat di luar wilayah itu. Potensi SDM sangat berkaitan erat dengan potensi mereka sebagai tenaga produksi yang terampil dan ahli serta potensi mereka sebagai tenaga manejerial.

Hal ini, ujar Surjadi dilatarbelakangi pemikiran akan adanya keterkaitan yang erat antara kegiatan produksi yang menjadi keahlian dan keterampilan mereka dengan aspek manjerial suatu usaha. Karena itu pengembangan SDM perlu dilaksanakan melalui alih pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan serta rencana pengembangan masyarakat setempat.

Pada sisi lain, daerah penyangga itu mungkin memiliki keunggulan dalam keterampilan dan keahlian tertentu tetapi tidak dalam potensi kegiatan ekonomi, sehinga kurang produktif dan efisien. Intervensi sosial ekonomi harus dapat menciptakan kegiatan sosial ekonomi yang sesuai keahlian dan keterampilan mereka, sehingga mereka akan lebih mandiri dan sejahtera.

Standar Kualitas

Desa Mitra Binaan mungkin memiliki potensi kegiatan ekonomi dan SDM, tetapi kegiatan ini tidak dapat berkembang lebih jauh karena hanya membatasi diri pada kebutuhan masyarakat lokal semata. Dalam hal ini, menurut Surjadi Soedirdja, intervensi sosial ekonomi akan menitikberatkan pada jaringan pemasaran. Kerja sama perlu dilakukan sejak awal dengan berbagai potensi yang ada di Kota Mitra Pembina untuk dapat memasarkan produk yang mereka hasilkan.

Pengalaman selama ini kata Gubernur, seringkali menunjukkan bahwa permasalahan utama bagi usaha kecil adalah lebih banyak menyangkut persoalan pemasaran dan standar kualitas produk. Karena besarnya peranan pembangunan di kota dalam membantu percepatan pengembangan desa rural menjadi desa urban terutama di wilayah penyangganya, maka dikotomi desa-desa dalam konteks pembangunan nasional perlu kita atasi secara konsepsional, agar dalam jangka panjang tidak menganggu keserasian pembangunan.

Hubungan timbal balik yang saling menguntungkan dalam konsep kemitraan, merupakan dasar bagi pertumbuhan yang serasi antara kota dan desa, yang menempatkan penduduk dan keluarga sebagai titik sentral pembangunan. Intervensi yang dilakukan ditujukan pada pembangunan sosial ekonomi masyarakat yang didukung oleh prioritas pembangunan fasilitas urban pada Desa Mitra Binaan.

Gubernur KDKI selaku Ketua Dewan Pimpinan BKS-AKSI mengajak para walikota dan para bupati beserta jajarannya serta seluruh sektor terkait termasuk swasta, untuk bersama-sama memberikan dukungan penuh terhadap kerja sama pengembangan program Bangga Suka Desa.

Sementara itu sebelumnya, Sekjen BKS-AKSI, Abdul Munir, yang juga ketua penyelenggara perhelatan di Gedung Mitra Praja, Sunter Jakarta Utara pada medio November 1995 itu memberitahu bahwa penandatangan naskah kesepakatan bersama kemitraan ini merupakan langkah awal yang strategis untuk ikut berperan serta dalam mengembangkan program Pembangunan Masyarakat Modern dalam Suasana Kota di Desa, "Bangga Suka Desa". Tujuannya untuk menjalin kemitraan, meningkatkan kesetiakawanan sosial dan mendorong upaya pengentasan kemiskinan, yang akan mempercepat pembangunan desa rural menjadi desa urban sebagai bagian dari upaya pengendalian mobilitas penduduk dari desa ke kota.

Kegiatan ini dihadiri oleh para pejabat dari berbagai departemen terkait, para walikota dari 97 kota beserta *staff* yang menangani masalah ini, para bupati dari Kabupaten *Hiterland* DKI Jakarta, para pejabat Pemda Jawa Barat, para Ketua Bappeda dan Bapeko serta Kepala Kantor Statistik dari kabupaten *Hiterland*. **(Vin)**

Gerakan Disiplin Nasional ialah Gerakan Moral untuk Hidup lebih Tertib & Sejahtera

Mendagri Yogi SM didampingi Gubernur KDKI Jakarta, Surjadi Soedirdja dan Dirjen Bangda Drs. H. Feisal Tamim memukul 'gong' sebagai tanda dibukanya Konreg Pembangunan Wilayah B

OPTIMALKAN CAPAIAN REPELITA VI

Oleh Moh. Yogie S. M.
(Menteri Dalam Negeri RI)

Pengantar Redaksi

Naskah ini diangkat dari pidato pengarahan Mendagri (penulis) pada rapat Konsultasi Regional Pembangunan (Konregbang) Kelompok Wilayah "B" se-Jawa & Bali di Jakarta beberapa waktu yang lalu.

Pengarahan ini amat vital bagi para aparat pelaksana di wilayah B yang meliputi 5 propinsi se-Jawa ditambah propinsi Bali dalam menyusun perencanaan, seterusnya melaksanakan, mengawasi dan meraih sukses pembangunan dalam Repelita VI yang tinggal dua tahun lagi.

Memanfaatkan masa yang dua tahun itu, penulis menyerukan usaha keras tiap aparat untuk meraih sukses optimal dalam Repelita VI tersebut.

Semoga arahan ini banyak memberi manfaat bagi seluruh aparat Pemda se-Jawa dan Bali. Amien. Red.

Arahan Mendagri Yogi SM kepada peserta Konreg : Optimalkan Capaian Pelita VI.

PRESIDEN pada 16 Agustus 1995, mengemukakan perlunya koreksi sasaran dan target laju pertumbuhan ekonomi Repelita VI dari 6,2% menjadi 7,1%.

Koreksi ini memerlukan pengkajian dan mungkin pula penjadwalan ulang berbagai kegiatan.

Bisa jadi pula kita perlu terobosan bagi optimalisasi sasaran Repelita VI tahunan (Sarlita) tanpa harus mengubah kebijakan dan program Repelita VI Nasional maupun daerah.

Yang perlu kita kaji dalam kesempatan ini antara lain penajaman skala prioritas dalam menentukan kegiatan apa yang memerlukan investasi sektor pemerintah dan apa saja yang memberi peluang investasi masyarakat dan sektor swasta, serta efisiensi dan fektifitas penyelenggaraan kegiatannya.

Selanjutnya untuk kegiatan pembangunan dari sektor pemerintah maupun sektor swasta diperlukan perumusan dan kesepakatan mengenai kegiatan apa yang memerlukan kerjasama antara dan antar sektor serta antar wilayah.

Kemampuan mengakomodir tantangan yang ada menjadi suatu peluang yang bermanfaat sebesar-besarnya bagi tercapainya sasaran pertumbuhan ekonomi nasional, adalah sangat penting.

Untuk itu, dituntut kepekaan tinggi tiap aparat perencana di tingkat pusat maupun daerah, dalam menanggapi tiap perkembangan ekonomi nasional, regional maupun global.

Perkembangan ekonomi tersebut harus pula selalu dipantau guna melihat dan memanfaatkan peluang pasar, sumber investasi dan keunggulan teknologi.

Selain itu, daerah dalam satu kelompok wilayah secara bersama dituntut mampu memanfaatkan peluang yang tercipta dari proses globalisasi ekonomi bagi perkembangan ekonomi nasional, serta harus meningkatkan kerjasama pembangunan ekonomi, dengan menekankan kepentingan per-kembangan ekonomi wilayah.

Dengan kata lain kerja sama pembangunan ekonomi antar daerah dalam satu kelompok wilayah harus dapat menciptakan jaringan ekonomi secara kompetitif, agar mempunyai akses dalam sistem perekonomian nasional ataupun global.

Perlu juga dikemukakan bahwa pemahaman dan penghargaan atas

bakat alam daerah masing-masing hendaknya mendapaa perhatian khusus.

Selain itu, metode melaksanakan pembangunan daerah hendaknya mempertimbangkan kondisi alam, sosial dan budaya setempat.

Dengan orientasi demikian, diharapkan lahir metode yang tidak menimbulkan friksi yang merugikan rakyat banyak.

Konsultasi regional pembangunan yang merupakan bagian dari siklus perencanaan pembangunan di daerah, sebagaimana diatur dalam Permendagri No.9/1982, untuk 1995 ini akan dilaksanakan secara berturut di beberapa kelompok wilayah hingga pertengahan Oktober '96.

Setelah itu kita akan melangkah ke tahap berikutnya, yaitu konsultasi nasional pembangunan, yang insya Allah akan diselenggarakan pada Minggu keempat Oktober 1995.

Dalam konsultasi nasional pembangunan tersebut usulan program/proyek yang berasal dari pusat.

Dengan keterpaduan tersebut, pembangunan diharapkan dapat memberikan hasil optimal meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga lebih mengambarkan keterpaduan penyelenggaraan asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan dalam pembangunan daerah.

Dari hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan hingga saat ini, tanpa mengurangi arti penting hasil pembangunan yang telah dicapai, ternyata masih dijumpai adanya kesenjangan pertumbuhan antar daerah dalam kelompok wilayah "B".

Kesenjangan tersebut ditunjukkan oleh perbedaan pertumbuhan ekonomi antar propinsi.

Berdasarkan data PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) tanpa migas menurut harga konstan 1983 dari 1983-1993, laju pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun untuk propinsi kelompok wilayah "B' adalah sebagai berikut:

Pertumbuhan Dt. I Jabar menduduki urutan teratas yaitu 8,70%/tahun kemudian berturut propinsi Dt. I Bali 8,58%, DKI Jakarta 7,60%, Jawa Tengah 6,65%, Jawa Timur 6,58% dan DI. Yogyakarta 5,41%.

Dilihat dari angka presentase masing-masing, indikator itu sangat membahagiakan. Pemerintah juga sangat berterima kasih.

Tapi perbedaannya perlu kita waspadai agar tidak terjadi ketidakseimbangan, berupa mengalirnya arus perpindahan penduduk dari daerah tertentu ke satu daerah tertentu lainnya.

Lebih lanjut, ditinjau dari komposisi nilai kontribusi PDRB tiap propinsi terhadap PDRB total kelompok wilayah "B" maka pada 1993 propinsi DT I Jawa Timur memberikan kontribusi terbesar, yaitu 27,68%.

Selanjutnya berturut propinsi DT I Jawa Barat 26,35%, DKI Jakarta 23,45%, Jawa Tengah 18,00%, Bali 2,78% dan DI. Yogyakarta 1,75%.

Komposisi nilai kontribusi tiap propinsi tersebut relatif sama dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dengan kata lain tidak terjadi suatu perubahan yang berarti.

Dari komposisi nilai kontribusi PDRB tiap propinsi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegiatan perekonomian di kelompok wilayah "B" belum tersebar secara merata, bahkan dapat dikatakan masih terpusat di propinsi daerah tingkat

Pengembangan Pantura, mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Alam.

I Jawa Timur, Jawa Barat dan DKI Jakarta.

Tapi kegiatan perekonomian antar propinsi di kelompok wilayah "B" sudah mengindikasikan adanya pola perkembangan yang mengarah pada terjadinya pemerataan.

Hal ini ditunjukkan oleh kenyataan, walaupun kontribusi PDRB propinsi DT I Bali terhadap total PDRB kelompok wilayah "B" jauh berada di bawah Jawa Tengah, propinsi ini telah berhasil mencapai laju pertumbuhan ekonomi jauh melampaui Jawa Tengah.

Jika kondisi ini dapat dipertahankan, Bali dalam waktu singkat akan dapat sejajar tingkat pembangunan ekonominya dengan Jawa Tengah.

Gejala pemerataan ini, juga dapat diamati antara propinsi DT I Jawa Barat, DKI Jakarta dan Jawa Timur. Sementara ini untuk DI Yogyakarta, memerlukan upaya yang sangat besar agar dapat mengejar ketinggalannya dari propinsi lain di kelompok wilayah "B".

Untuk memacu laju pertumbuhan ekonomi propinsi DT I Jawa Tengah, Propinsi Dati I Bali dan DI Yogyakarta guna menciptakan keserasian pertumbuhan ekonomi antar daerah di kelompok wilayah "B", sangat diperlukan pendekatan pola kerjasama pembangunan antar daerah yang mampu mendorong menguatnya interaksi ekonomi antar daerah sesuai karakteristik tiap daerah.

> Selain itu metode melaksanakan pembangunan daerah hendaknya memperkembangkan kondisi alam, sosial dan budaya setempat.

Penerapan pendekatan kerjasama pembangunan tersebut, menuntut kesepakatan kebijaksanaan pembangunan antara dan antar sektor dan derap yang berorientasi ke peningkatan peranan Pemda, masyarakat dan dunia usaha.

Orientasi ini tetap mengacu pada kebijakan nasional untuk menumbuhkembangkan kegiatan usaha, serta memperluas lapangan kerja dengan menggali sumber daya alam (SDA) dan mengerahkan SDM bagi pengembangan ekonomi regional.

Melalui pendekatan pembangunan tersebut diharapkan hasil pembangunan yang dicapai secara berkelanjutan akan mengurangi kesenjangan pertumbuhan antar wilayah/daerah.

Tiap daerah diharapkan mampu memberikan kontribusinya yang makin seimbang dan meningkat terhadap perekonomian nasional.

Hal lain yang harus mendapat perhatian berkait proses globalisasi ekonomi dunia, yaitu perkembangan realisasi "Deklarasi tekad bersama para pemimpin ekonomi APEC (*APEC Economic Leader's Decleration of Coomon Resolve*)" yang kemudian dikenal dengan "Deklarasi Bogor".

Deklarasi ini adalah hasil pertemuan para pemimpin APEC (*APEC Economic Leader's Meeting-AELM*) di Bogor 15 Nopember 1994.

Salah satu komitmen para pemimpin APEC tersebut ialah akan memberlakukan perdagangan dan investasi bebas dan terbuka pada tahun 2010 bagi negara maju dan 2020 bagi negara berkembang, khususnya di kawasan Asia Pasifik.

Sementara itu, negara anggota ASEAN sepakat melaksanakan perdagangan bebas mulai 2003.

Momentum deklarasi bogor tersebut tak lama lagi akan menciptakan tantangan sekaligus peluang di bidang perdagangan dan investasi yang harus diantisipasi sejak dini.

Sebab itu, propinsi dalam kelompok wilayah "B" sebagai

wilayah yang menjadi basis kekuatan ekonomi nasional, dituntut lebih mengintensifkan kerjasama pembangunan ekonomi antar daerah maupun antar kelompok wilayah.

Berkait pelaksanaan perdagangan dan investasi bebas di antara negara ASEAN pada 2003, selama ini telah dijalin kerjasama Sub-regional guna mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi antara berbagai wilayah negara ASEAN.

Berbagai kerjasama Sub-Regional ASEAN dimaksudkan di antaranya adalah IMT-GT (Indonesia Malaysia Thailand-Growth Triangle) yang melibatkan propinsi daerah istimewah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat;

IMS-GT (Indonesia-Malaysia Singapore-Growth Triangle) melibatkan propinsi Sumatera Barat dan Riau;

BIMP-EAGA (Brunai Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines-East Asean Growth Area) melibatkan propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara.

Walaupun kerjasama Sub-Regional tersebut tidak melibatkan satupun propinsi dalam kelompok wilayah "B", diharapkan propinsi-propinsi di kelompok wilayah "B" yang merupakan basis kekuatan ekonomi, kiranya dapat membantu dan mendukung propinsi yang telibat dalam kerjasama Sub-Regional tersebut, agar propinsi dimaksud dapat memanfaatkan tiap peluang yang tercipta dari kerjasama Sub-Regional Asean.

Melalui kerjasama antar daerah yang saling menguntungkan di antara propinsi dalam kelompok wilayah "B" dengan propinsi yang terlibat dalam kerjasama Sub-Regional Asean, tentu akan

Pemenuhan kebutuhan sarana & prasarana transfortasi, khususnya angkutan umum massal, mendapat cukup perhatian pembangunan pembangunan DKI Jakarta.

membuka peluang bagi propinsi tersebut untuk mendorong pengembangan dunia usaha dan investasi swasta, baik melalui penanaman modal asing (PMA), penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal non fasilitas di derah masing-masing.

Ini secara keseluruhan merupakan modal dasar untuk menyongsong pelaksanaan perdagangan dan investasi bebas 2003 di kawasan Asean.

Semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat tiap daerah untuk mewujudkan dan mengintensifkan kerjasama pembangunan ekonomi tersebut, di satu pihak akan meningkatkan kemampuan daerah maupun wilayah untuk memanfaatkan peluang yang tercipta.

Peluang ini akan muncul saat negara maju di kawasan Asia Pasifik menerapkan perdagangan dan investasi bebas pada 2010.

Di lain pihak mereka akan memiliki ketahanan yang tangguh untuk menghadapi tantangan yang tercipta saat negara kita melaksanakan perdagangan dan investasi bebas pada 2020.

Maka, dalam kesempatan konsultasi regional pembangunan, saya menghimbau agar dalam berkonsultasi nanti, saudara-saudara memberikan bobot yang lebih besar untuk merumuskan dan menyepakati berbagai kebijaksanaan bersama, yang mengarah pada tujuh upaya :

Pertama, pengembangan kerjasama ekonomi guna meningkatkan ekspor non migas melalui pendayagunaan komoditas yang berkeunggulan komperatif dan didukung pengembangan SDM dan penguasaan teknologi, sehingga dapat menghasilkan produk ekspor non migas yang berkeunggulan kompetitif di pasaran nasional maupun internasional.

Kedua, pengembangan kerjasama antar daerah guna meningkatkan keterampilan tenaga kerja, pembangunan infrastruktur dan pengembangan aneka sumber potensi wilayah.

Selain itu penting usaha

bersama untuk mengeliminasi hambatan yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Ini perlu guna mendorong berkembangnya dunia usaha dan investasi swasta melalui PMA, PMDN maupun non-fasilitas.

Ketiga, pengembangan kerjasama pembangunan wilayah perbatasan antar propinsi untuk membuka keterisolasian dan penanggulangan kemiskinan di wilayah perbatasan antar propinsi, agar tercipta pertumbuhan ekonomi antar daerah yang serasi.

Keempat, pengembangan kerjasama pembangunan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang melintasi beberapa propinsi melalui pengaturan pengelolaan pembangunan yang berpijak pada penataan fungsi ruang yang serasi dan selaras serta mengikuti kaidah lingkungan hidup, sehingga tercipta keserasian pertumbuhan antar daerah.

Kelima, pengembangan kerjasama pembangunan wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa guna mengoptimalkan pemanfaatan SDA khususnya sumber daya lahan yang ada.

Berkembangnya kegiatan ekonomi harus didorong tapi tanpa merubah fungsi areal persawahan yang beririgasi teknis. Kaidah kelestarian lingkungan hidup pun harus diperhatikan.

Keenam, pengembangan kerjasama pembangunan ekonomi guna menciptakan keterkaitan kegiatan ekonomi intensif dengan daerah dalam kelompok wilayah lainnya, sehingga terjadi penyebaran investasi ke semua wilayah bersangkutan.

Ketujuh, mengembangkan kerjasama lintas sektoral dan daerah, khususnya meningkatkan kemampuan aparatur dan peranan kelembagaan pemerintah di daerah untuk meningkatkan pengelolaan program kerjasama, baik antar sektor maupun antar daerah secara terpadu.

Setelah mengemukakan kesenjangan pertumbuhan antar daerah, serta tantangan yang dihadapi dalam upaya mencapai sasaran pembangunan ekonomi nasional, ingin pula saya mengingatkan isu pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Hal ini perlu saya utarakan mengingat pelaksanaan pembangunan nasional hingga kini, dirasakan masih kurang berpihak ke aspek kelestarian lingkungan hidup.

> Pertumbuhan propinsi Dati I Jabar menduduki urutan teratas yaitu 8,70%/ tahun. Kemudian berturut propinsi Dati I Bali 8,58%, DKI Jakarta 7,60%, Jateng 6,65%, Jatim 6,58% dan DI Yogyakarta 5,41%/tahun.

Sebagai ilustrasi, data pada awal Pelita VI, luas areal kritis di Pulau Jawa dan Bali 1.121.753 hektar sampai akhir Pelita VI target lahan kritis yang dapat ditanggulangi diperkirakan hanya dapat ditanggulangi diperkirakan hanya 979.485 hektar atau 87,32%.

Maka sisa lahan kritis yang belum dapat ditanggulangi sekitar 142.268 hektar. Namun kenyatannya luas lahan kritis pada akhir Pelita VI akan lebih besar lagi, mengingat lahan kritis baru akn timbul selama masa itu.

Bertambahnya luas areal lahan kritis tersebut umumnya disebabkan desakan kebutuhan lahan untuk keperluan berbagai kegiatan.

Kondisi ini, terlebih bila terjadi di hulu daerah aliran sungai, akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem dan potensi sumber daya air, baik segi fluktuasi debit maupun kualitas air.

Berbagai konflit berkait pencemaran lingkungan dan menurunnya daya dukung lingkungan yang berkembang akhir-akhir ini, misalnya pencemaran sungai di beberapa tempat oleh pembuangan limbah industri, merupakan fenomena pembangunan yang mengeksploitasikan SDA secara berlebihan tanpa mempertimbangkan pelestarian kualitas lingkungan hidup.

Fenomena tersebut juga merupakan tantangan pembangunan yang harus kita cermati dan antisipasi, agar hasil pembangunan yang telah dicapai dapat secara berlanjut menopang upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat luas.

Karena itu, upaya mengurangi dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan harus makin ditingkatkan, melalui pembangunan yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah serta penerapan AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan) secara ketat, termasuk upaya konservasi dan rehabilitasi lingkungan.

Program melestarikan lingkungan hidup memiliki bobot kerjasama antar daerah yang bersi-

fat mutlak dan berjangka panjang.

Hal ini didasari kenyataan, bahwa wilayah perencanaan program tersebut mencakup satu kesatuan ekosistem yang umumnya melampaui lebih dari satu wilayah administratif.

Dengan demikian dalam kerjasama yang dibangun, tiap daerah harus saling memberikan kontribusi secara penuh, tanpa melihat kepentingan internal daerah dalam jangka pendek.

Pembahasan dan pengkajian secara cermat dan mendalam terhadap hal-hal di atas saya harapkan bisa meningkatkan nilai pelaksanaan konsultasi regional pembangunan kali ini, sehingga tampaknya tidak akan ada waktu untuk membahas program/proyek individual propinsi dalam forum ini.

Dengan demikian peranan konsultasi regional pembangunan menjadi semakin strategis bagi keberhasilan pembangunan nasional.

Tidak kalah pentingnya adalah mencoba melihat kembali realisasi hasil konsultasi regional pembangunan masing-masing kelompok wilayah, yang tercermin dari pemanfaatan dana yang telah dialokasikan baik dalam APBD tiap daerah maupun dalam APBN, yang ternyata rata-rata per tahun masih di bawah angka 50%.

Rendahnya angka realiasi tersebut, selain disebabkan terbatasnya kemampuan pembiayaan pembangunan, sehingga diperlukan skala prioritas, juga karena belum adanya upaya sungguh-sungguh dari semua pihak, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, untuk mewujudkan hasil kesepakatan yang telah dicapai.

Di samping itu, ditinjau dari segi fasilitas usulan, masih banyak dijumpai usulan program/proyek yang tidak memiliki nilai strategis untuk mengatasi permasalahan yang berkembang, baik kini maupun mendatang.

Usulan program/proyek yang diajukan, banyak yang masih bersifat kepentingan internal masing-masing daerah dan belum mencerminkan kepentingan bersama.

Untuk itulah saya mintakan perhatian terhadap hal-hal berikut:

Pertama, usulan kebijakan yang akan dibahas di forum ini agar benar-benar memiliki tingkat kepentingan bersama di antara beberapa daerah yang tergabung dalam satu kelompok wilayah tanpa terikat pada batas wilayah administrasif.

Usulan tersebut juga didasarkan pada pemahaman bersama terhadap isu-isu pembangunan yang berkembang saat ini maupun mendatang.

Kedua, usulan program/proyek yang akan dibahas dalam forum ini agar benar-benar bernilai strategis, yang dapat bermanfaat dan mendorong pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah, maupun bagi daerah dalam kelompok regional.

Lebih dari itu dapat bermanfaat dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masing-masing daerah.

Ketiga, usulan program/proyek yang akan dibahas dalam forum ini hendaknya benar-benar didasari beberapa pendekatan yang dilakukan secara seiring dan sejalan.

Pendekatan itu a.l: pendekatan wilayah sebagai lokasi pembangunan, pendekatan sektor sebagai pengisi pembangunan, dan pendekatan SDM sebagai pelaku pembangunan dan pendekatan teknologi untuk keunggulan kompetitif.

Keempat, khusus kepada peserta konsultasi regional pembangunan yang memiliki departemen/lembaga non departemen tingkat pusat, saya mengharapkan perhatiannya untuk dapat berperan aktif dalam konsultasi ini.

Kehadiran para wakil dari instansi tingkat pusat sangat diperlukan untuk dapat memberikan tanggapan dan informasi yang pasti bagi daerah, sehingga usulan program/proyek dapat disesuaikan kebijaksanaan yang telah digariskan masing-masing instansi tingkat pusat.

Kelima, kelompok wilayah "B" agar menunjuk salah seorang gubernur KDH tingkat I untuk mengangkat hasil konsultasi regional pembangunan ini dalam forum konsultasi nasional pembangunan yang akan datang.

Selain itu, tiap Dt I dituntut ketaatannya untuk menindak lanjuti tiap hasil kesepakatan yang telah dicapai ke dalam APBD masing-masing daerah.

Untuk memantau tindak lanjut konsultasi regional pembangunan ini kiranya keberadaan sekretariat bersama wilayah pembangunan dapat berperan aktif.

Disertai serangkaian harapan tersebut seraya memohon bimbingan dan petunjuk Allah SWT, bismillahirrohmannirrahim, "Konsultasi regional pembangunan kelompok wilayah "B" 1995, dengan resmi dibuka".

Selamat bekerja, semoga Tuhan Yang Masa Esa selalu memberkahi upaya kita dalam menyongsong masa depan yang lebih baik.

(HUHB)

Presiden Soeharto mencanangkan PIN '95, tanggal 13 September 1995

PIN '95 DI JAKARTA SUKSES

WARGA SANGAT ANTUSIAS

PEKAN Imunisasi Nasional (PIN) merupakan upaya besar yang dilaksanakan untuk membasmi penyakit polio dan virus polio liar di Indonesia. Gerakan ini merupakan pelaksanaan kesepakatan dunia bagi pembebasan polio dan virus polio liar di seluruh dunia pada tahun 2000 mendatang.

Sidang Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) ke-41 enam tahun lalu (1988), yang dihadiri Menteri Kesehatan dari negara-negara anggota PBB, memang telah ditetapkan G*lobal Polio Eradication* atau pembasmian polio secara global. Hasil sidang itu kemudian diformulasikan dalam Konfrensi Tingkat Tinggi Anak (W*orld Summit for Children*) September 1990, dengan sasaran kesejahteraan anak. Pembasmian Polio secara global dianggap cukup layak, sebab kekebalan dapat ditimbulkan melalui imunisasi.

Gerakan ini diwujudkan dalam bentuk pemberian imunisasi polio sebanyak dua tetes, dua kali dalam tenggang waktu empat minggu kepada semua anak di bawah usia lima tahun (balita), tanpa mempertimbangkan pemberian imunisasi polio itu telah diberikan sebelum pelaksanaan PIN ini.

Upaya tersebut dianggap berhasil bila dua tahun setelah pelaksanaan PIN tidak ditemukan kasus polio lagi di Jakarta atau di Indonesia. Untuk mencapai ini, jalan satu-satunya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan imunisasi polio kepada seluruh anak Balita 0 s/d 59 bulan.

Gerakan yang telah dilaksanakan tahun 1995 itu, tahun 1996 dan tahun 1997 mendatang, pada bulan September dan Oktober setiap tahunnya. PIN tahun 1995 ini hanya memberikan imunisasi polio.

Sedangkan untuk tahun 1996 dan 1997 selain imunisasi polio, direncanakan akan pula ditambah

dengan diberikannya imunisasi campak pada balita dan imunisasi TT (*Tetanus Toxoid*) pada ibu hamil dan ibu balita. Namun imunisasi campak dan imunisasi TT ini hanya akan diberikan kepada mereka yang tinggal di daerah yang berisiko tinggi.

Pencanangan PIN oleh Presiden

Rabu 13 September 1995 lalu secara serentak di seluruh Indonesia dilaksanakan PIN, sebagai tanda dimulainya gerakan pembasmian (*eradikasi*) polio di Indonesa. Presiden Soeharto mengawali PIN tahun ini dengan memberikan vaksin polio kepada dua balita di tempat kediaman, di Jalan Cendana, Jakarta. Juga Ibu Tien Soeharto memberikan vaksin kepada dua balita dan diteruskan oleh pejabat-pejabat yang hadir maupun petugas imunisasi.

Wakil Presiden RI, TrySutrisno meneskan vaksin polio kepada cucu tercinta: Dianta Reisa Teddy Astuti di kediaman jalan Diponegoro, menandakan dimulainya Pencanangan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) bagi balita Indonesia tahun 2000 mendatang.

Di antara ke 20 balita yang divaksin di lokasi tersebut, terdapat pula cucu Presiden. Selain Ibu Tien Soeharto, Menterti Kesehatan Sujudi, Menko Kesra Azwar Anas, Mendagri Yogie SM, hadir pula Rano Karno "Si Doel" dan Mandra menyaksikan dimulainya Gerakan PIN.

Peresmian dimulainya PIN ini disaksikan pula oleh Dubes negara-negara sahabat, anggota LSM Internasional, Ny. Hosokawa dan Rajendra K. Sabo yang telah memberi bantuan untuk pelaksanaan PIN. Pemberian vaksin polio dilaksanakan pula oleh Wakil Presiden dan Ibu Try Sutrisno di rumah kediamannya di Jl. Diponegoro Jakarta Pusat.

Wakil Gubernur KDKI Bid. Kesra, H. RS. Museno memulai PIN putaran I di Perumnas Klender Jakarta Timur

PIN Putaran Pertama

Wakil Gubernur DKI Bidang Kesra, H.RS. Museno melalui PIN di Pos Pelayanan PIN yang berada di ruang serbaguna Perumahan Susun Klender Jakarta Timur. Saat memulai PIN Wagub Museno mengungkapkan, gerakan yang dilaksanakan serentak ini merupakan kegiatan besar yang melibatkan semua lapisan masyarakat khusus untuk wilayah DKI Jakarta saja diperkirakan jumlah penduduk yang terlibat secara langsung dalam kegiatan ini tidak kurang dari dua juta orang.

Jumlah itu terdiri dari Balita

Ibu Try Sutrsno memberikan tetesan vaksin Polio kepada salah seorang anak balita yang dilaksanakan di Halim Perdanakusuma PIN Putaran Kedua tanggal 18 Oktober 1995, didampingi Ketua TP PKK Pusat, Ibu Yogie SM dan Rano Karno serta Mandra

yang diimunisasi, pengantar Balita, kader PKK, Dharma Wanita, Organsasi Sosial, masyarakat dan petugas pemerintah yang terlibat dalam PIN ini. Jumlah bayi yang diimunisasi pada PIN Putaran Pertama DKI Jakarta adalah 921.645 balita, ini berarti 99,3% dari proyeksi Departemen Kesehatan yaitu sejumlah 928.100 balita.

Dalam pelaksanaan PIN putaran pertama, Pemerintah DKI Jakarta, bersama-sama PKK, LKMD, KNPI, Pramuka, ABRI, Rumah Sakit, Tokoh Agama dan pemuka masyarakat menyediakan Pos PIN sebanyak 9.546 buah. Pos-pos PIN ini tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta, mulai dari RW, Taman Kanak-kanak, Tempat Penitipan Anak, Rumah Sakit, Puskesmas, Dokter Anak, Stasiun KA, terminal Bis Antar Kota, Bandara Soekarno-Hatta dan Halim Perdanakusuma, Pelabuhan Tanjung Priok, Pasar-pasar dan tempat-tempat yang disediakan oleh perusahaan tertentu untuk balita dari karyawan perusahaan yang bersangkutan.

Pelaksanaan PIN putaran pertama di DKI Jakarta mendapat sambutan yang sangat antusias dari warga Ibukota. Saking antusiasnya ibu-ibu membawa anak balitanya ke POS PIN sampai menuntut adanya penambahan kartu balita, dan penambahan vaksin.

> Wagub DKI
> Bid. Kesra,
> H. RS. Museno:
> PIN di DKI Jakarta libatkan secara langsung 2 juta orang.

Mengatasi hal ini, Posko PIN DKI Jakarta dengan tangkas segera mengeluarkan tambahan. Pada hari pertama saja (Rabu 13 September 1995) dikeluarkan sebanyak 13.000 botol vaksin dan 40.000 lembar kartu balita, tambahan. Padahal sebelumnya untuk pelaksanaan imunisasi hari pertama ini Posko PIN DKI telah mendrop 32.813 botol vaksin. Dengan rincian Jakarta Pusat 3.827 botol, Jakarta Utara 4.972 botol, Jakarta Barat 6.246 botol, Jakarta Selatan 7.928 botol dan Jakarta Timur 9.839 botol.

Jumlah sukarelawan dan petugas yang telah dilatih untuk pelaksanaan kegiatan PIN tidak kurang dari 20.000 orang, vaksin polio yang disiapkan sebanyak 117.000 botol (setiap botol memuat seikitar 40 tetes yang dapat mencukupi 20 anak balita). Adapun biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah meliputi sekitar Rp. 1,7 milyar.

Seorang anak berusia sekitar empat tahun pada salah satu Pos PIN di wilayah Jakarta Timur, ketika ditanya tentang rasa vaksin polio yang telah ditelannya, dengan polos menjawab sambil tersenyum "Rasanya asyik", ujarnya meniru ucapan Rano Karno seperti dalam iklan PIN yang sering ditayangkan stasiun TV.

PIN Putaran Kedua

Lima minggu setelah pelaksanaan PIN putaran pertama yaitu, Rabu 18 Oktober 1995, kembali digelar pelaksanaan PIN. Pada putaran kedua ini, dimulai oleh Ibu Try Sutrisno di sebuah Klinik yang berada di Komplek Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur.

Dalam kesempatan tersebut Ibu Try antara lain didampingi Ketua PKK Pusat Ny. Yogie SM, Wakil Gubernur DKI Bidang Kesra H.R.S. Museno serta Ketua PKK DKI Ny. RS. Museno. Usai dari klinik yang terletak di Jl. Trikora Komplek Halim Perdanakusuma

tersebut, Ibu Try Sutrisno beserta rombongan kemudian keliling di kelima wilayah kotamadya DKI Jakarta.

Rombongan meninjau ke beberapa Pos PIN yang tersebar di beberapa tempat. Pos PIN yang dikunjungi antara lain yang terletak di Balai Rakyat Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan, Komplek RCTI Jalan Raya Perjuangan Jakarta Barat, Kelurahan Kelapa Gading Jakarta Utara dan Kelurahan Galur Jakarta Pusat.

Pelakanaan PIN Putaran Kedua, juga diramaikan oleh kehadiran dua orang bintang sinetron "Si Doel Anak Sekolahan", yaitu Rano Karno dan Mandra. Bahkan dalam kesempatan Mandra secara spontan meminta salah satu balita untuk digendongnya. Balita di Pos PIN ini berebut ingin agar vaksin polio diteteskan oleh dua bintang tersebut, lantas mereka pun didaulat menjadi petugas PIN. Dokter, paramedik dan petugas PIN terpaksa mengalah.

"Kami kalah penggemar", ujar salah seorang petugas PIN sambil tersenyum. Tidak hanya itu, bahkan Menteri Kesehatan, Sujudi pun mengaku kalah beken dibanding dua aktor yang lagi naik daun tersebut. Pengakuan ini disampaikan Menkes Sujudi kepada pers beberapa waktu lalu ketika ditanya sehubungan terpilihnya kembali Rano dan Mandra sebagai tokoh utama pada publikasi PIN putaran kedua. "Saya akui mereka (Rano dan Mandra) lebih beken daripada saya. Masyarakat lebih kenal mereka dibanding terhadap saya. Kami masih tetap mempercayai mereka untuk menyampaikan informasi PIN putaran kedua ini kepada masyarakat," ungkapnya seperti dikutip salah satu pers ibukota.

PIN juga dilaksanakan Pasar Pulogadung

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dr. Aslan Lasman, SKM menyampaikan bahwa PIN putaran kedua di DKI Jakarta telah mengimunisasi 980.346 balita, ini berarti 105,63% dari sasaran sebanyak 928.100 balita. (Sumber: Laporan Dinas Kesehatan DKI, 23 Oktober 1995).

Di wilayah Jakarta Pusat pada periode tersebut telah diimunisasi 136.762 (97,44%) balita dari target 140.354 balita; Wilayah Jakarta Utara 141.539 (102,05%) balita diimunisasi dari target 138.090 balita. Di wilayah Jakarta Barat telah diimunisasi sebanyak 210.695 (116,33%) balita, padahal targetnya hanya 181.124 balita. Di Jakarta Selatan 236.985 (101,21%) balita telah diimunisasi dari targetnya sebanyak 234.154 balita. Sedangkan di Jakarta Timur 254.365 (108,53%) balita diimunisasi dari target sebanyak 234.378 balita.

PIN di Kepulauan Seribu

Seusai mendampingi Presiden Soeharto memulai PIN di Jl. Cendana, Menteri Kesehatan beserta ibu Sujudi, Ketua PIN Broto Wasisto, Dirjen PPM dan PLP Depkes, Hadi M. Abednego, Ketua Umum PKK Ny. Yogie SM, Kepala Perwakilan WHO dan Unicep di Indonesia meninjau pelaksanaan PIN di Pulau Pramuka-Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Mendapat laporan tentang lancarnya pelaksanaan PIN di DKI Jakarta, Menkes Sujudi tersenyum gembira juga nampak di wajah para ibu di seluruh Indonesia yang telah mendapat kesempatan emas bagi masa depan anaknya, yaitu kesempatan mengimunisasikan anak balitanya.

Dengan keberhasilan pelaksanaan PIN, Indonesia dapat bersama-sama dengan negara lain memproklamasikan Dunia Bebas Polio (*The World Free of Folio*) pada tahun 2000 nanti. Sebab kalau ada satu negara saja yang belum bebas polio maka yang akan dilakukan tak akan tercapai, ungkap Sujudi seperti dikutip oleh salah satu pers ibukota.

(Zul)

PROFIL

FIFI ALEYDA YAHYA

NONE JAKARTA '95

RATA-rata mantan None Jakarta segera populer setelah terjun ke dunia *entertainment*. Sebut saja Venna Melinda yang jadi *ngetop* gara-gara membintangi beberapa sinetron. Pemirsa televisi tentu merasa tak asing lagi dengan wajah mantan None Jakarta 1992 itu, misalnya dalam sinetron "Bella Vista".

Atau kita lihat Maudy Kusnadi yang bermain dengan Rano Karno dalam sinetron "Si Doel Anak Sekolahan", mantan None Jakarta 1993 itu juga setiap malam kita lihat sedang memamerkan rambutnya yang indah terurai panjang dalam tayangan iklan salah satu merek shampoo di layar kaca.

Lantas bagaimana dengan penyabet None Jakarta 1995, Fifi Aleyda Yahya? Yang satu ini ternyata tidak latah. "Saya punya rencana-rencana sendiri. Tidak ikut-ikutan terjun ke sinetron atau modelling. Saya mau *nerusin* ke S-2 bidang MBA atau *broadcast*," tandas Fifi kepada ***Media Jaya.***

Rambut boleh sama, tetapi pikiran berbeda, barangkali adagium ini tepat untuk Fifi yang sekarang tinggal menyelesaikan skripsi pada Jurusan Manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti. Fifi memang melihat banyak mantan None Jakarta yang terjun ke dunia *entertainment*. Tapi menurutnya, tergantung tujuan masing-masing. "Kalau memang

Bersama sepupunya Linda & Citra pada malam final

Bersama mama di Paris, 1994

Di Strasbourg, 1995

dia bagus dan baik di bidang itu, kenapa tidak?"

Setelah masa kontrak setahun dengan Pemerintah DKI Jakarta habis, agaknya Fifi tidak memilih dunia yang penuh popularitas. "Tujuan dan alasan saya ikut pemilihan Abnon Jakarta 1995, bukan ke sana, melainkan untuk memperluas wawasan dan menambah pergaulan. Tujuan setiap orang kan masing-masing. Saya malah lebih berminat pada bidang manajemen pertelevisian," kata Fifi yang mendambakan gelar MBA.

Sebelum Fifi berpredikat None Jakarta, ia belum pernah terjun ke dunia *entertainment*. Ini berbeda dengan kebanyakan None Jakarta pendahulunya, yang rata-rata sudah tak asing lagi di tayangan iklan atau menjadi modelling.

Karenanya, bila masa kontraknya dengan Pemda DKI usai kelak, Fifi ingin cepat-cepat melanjutkan studinya. "Kalau kelamaan berhenti akan timbul rasa malas," katanya bernada khawatir.

Meraih predikat None Jakarta, menurut Fifi, tidak menjamin dapat mulus bekerja di kemudian hari. "Predikat itu bukan jaminan dapat bekerja di mana saja dengan mudah. Apalagi mendapat prioritas, dalam soal pekerjaan Pemda DKI sendiri tidak menjanjikan apa-apa *koq*," kata Fifi.

Bagi Fifi sendiri, predikat itu bagaimanapun menjadi satu kebanggaan. Ini tidak terlepas dari bagaimana pandangan pihak lain terhadap predikat itu sendiri. "Saya tidak tahu persis, bagaimana pandangan dunia usaha terhadap predikat None Jakarta misalnya. Jadi. lebih baik jangan bersikap mentang-mentang. Bagaimanapun mesti melalui prosedur yang semestinya. "Pokoknya tergantung kemampuan individunya saja," ujar Fifi.

Memang, penyandang citra sebagai None Jakarta cukup berat. Ini juga diakui oleh Fifi. Sebab bagaimanapun tidak hanya penampilan fisik saja yang sudah teruji dalam satu ajang pemilihan, tapi juga kemampuan intelektual. Lebih-lebih dimulai tahun ini, dewan penilai yang biasanya lima orang ditambah dua orang masing-masing seorang psikolog dan ahli komunikasi.

Dengan begitu, ajang itu tidak hanya mempunyai target mengembangkan bakat, kreativitas dan kemampuan intelektualitas tapi juga keteladanan generasi muda. "Jadi, bagaimana kita mesti mampu menjadi teladan bagi masyarakatnya," kata Fifi.

Tugasnya pun, menurut Fifi, semakin berat. Ini mengingat dengan dipilihnya Jakarta bersama Surabaya sebagai DTW (Daerah Tujuan Wisata) utama setelah Bali yang dipromosikan Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI) di mancanegara.

Fifi menunjuk kegiatan promotif bertepatan 50

International Student Conference 1993 Jepang

tahun Indonesia Merdeka, yang digelar secara besar-besaran baik di dalam maupun di luar negeri. Di sini, Abnon tidak saja mengemban misi sebagai Duta Wisata Jakarta, tapi juga Negara.

"Jadi, Abnon harus mampu menjelaskan bagaimana sejarah dan perkembangan Indonesia selama 50 tahun menjadi bangsa yang berdaulat dan berperan dalam percaturan dunia internasional," papar Fifi.

Karena itu, pada pemilihan tahun ini Dinas Pariwisata DKI Jakarta lebih menajamkan lagi pada kriteria kemampuan menjadi duta yang efektif dengan penguasaan yang sungguh-sungguh terhadap kebudayaan Indonesia khususnya Betawi, sejarah kota Jakarta dan pengembangan Jakarta sebagai *Indonesia's business and convention center*.

"Kami juga harus mampu memahami strategi pembangunan Jakarta menuju kota jasa dengan lima pilar utamanya yakni sebagai pusat pelayanan masyarakat (*center of public service*), pusat perdagangan dan industri (*center of trade and industry*), pusat keuangan (*center of business and finance*), pusat pariwisata (*center of human development*)," kata Fifi.

Dengan begitu, kata Fifi, figur Abnon dituntut memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik untuk menjadi *spokesperson* kepada publik secara langsung maupun melalui media massa. "Artinya kita diharapkan menjadi *presenter* yang baik di bidangnya," jelas Fifi.

Apa kiatnya, dalam berkomunikasi, bagi Fifi mesti dilihat dulu siapa orangnya. Misalnya dari kalangan apa, usianya maupun tingkat sosialnya. Jadi, cara berkomunikiasi tidak bisa diterapkan untuk semua orang. Misalnya, cara komunikasi dengan kalangan atas tentu berbeda dengan kalangan bawah.

"Apalagi kalau bicara dengan wartawan, mesti dibedain dong. Tapi kalau soal keramahtamahan itu sih sama saja," ujar Fifi. Kendatipun demikian Fifi mengaku, soal cara berkomunikasi tidak begitu menjadi masalah baginya. "Saya sih biasa saja, tidak terlalu memikirkan mesti bicara apa. Santai saja, tidak perlu dibuat-buat sehingga malah terkesan kaku," kata Fifi.

Prinsipnya, mesti menjadi diri sendiri, tidak perlu mencontoh orang lain, sebab malah menjadi palsu. "Kalau menjadi diri sendiri ketika menjalankan tugas

akan lebih enak. Lebih *enjoy* sekalipun mesti berpanas-panas di bawah terik matahari," katanya.

Masalahnya, kata Fifi, di dalam menjalankan tugas sebagai duta wisata, tidak selalu ditempat yang enak. Tidak selalu di hotel berbintang atau tempat-tempat elit. Satu waktu pasti di lapangan dibawah terik matahari. Karena itu, seorang abnon dituntut pula untuk bisa menahan diri.

"Jangan kita lantas jadi kesal, ambil hikmahnya saja. Apalagi misalnya sebelumnya sudah merasa kesal dari rumah, kita mesti bisa menahan emosi seperti itu," kata Fifi yang mengaku tak punya kiat khusus untuk mengendalikan amarah. Antara lain dengan cara berolahraga prakrtis di samping untuk meningkatkan stamina.

Tahun dari Kawan

Fifi mengetahui kontes Abnon dari kawannya yang pernah predikat *none* dari Jakarta Barat. Pada mulanya Fifi ragu karena menyangka pemilihan itu lebih merupakan kontes kencantikan. Tapi setelah mendapat penjelasan. Fifi akhirnya setuju *ikutan*, apalagi di kegiatan studi Fifi tinggal menyelesaikan skripsi.

"Alahamdulillah, Fifi berhasil meraih tingkat pertama padahal semula tidak menargetkan apa-apa. Tapi ada sih, target masuk lima besar waktu terpilih di tingkat DKI Jakarta," kata Fifi.

Fifi waktu ikut pemilihan di tingkat wilayah Kotamadya Jakarta Barat karena kebetulan Fifi kuliah di Universitas Trisakti. "Jadi tinggal menyeberang saja ke kantor walikota Jakarta Barat," ujar Fifi.

Fifi mengaku sudah ketemu saingan yang berat-berat tatkala masih seleksi di tingkat wilayah. "Saya tidak menganggap remeh yang lain, kelihatannya berat-berat. Tapi saya yakin, setiap orang ada kelebihan dan kekurangannya," kata Fifi yang mengaku tak grogi, tapi kalau tegang, iya.

Fifi yang berpasangan dengan Cucu Ahmad Kurnia juga wakil dari Kodya Jakarta Barat, berhasil menyisihkan 881 peserta dari lima wilayah dan mengalahkan 30 peserta (15 pasang) finalis, dengan dewan juri diketuai oleh Asmawi Manaf.

Berbeda dari biasanya, kali ini pemilihan Abnon yang berlangsung 11 Agustus lalu mengambil tempat di halaman Museum Sejarah di Taman Fatahillah, tidak lagi di hotel berbintang.

Diboyong ke Kuwait

Fifi yang memiliki tinggi badan 160 cm dan berat badan 48 kg itu lahir di Jakarta, 1 April 1973. Dia merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Syamsuddin Yahya asal Lampung dan Andi Mutiara berasal dari Bugis, Sulawesi Selatan.

Karena tugas ayahnya, Fifi sering diboyong ke luar negeri sehingga untuk berbahasa Inggris sudah tak lagi asing baginya. Dia mengaku sudah fasih berbahasa Inggiris sejak kecil.

Fifi diboyong ke Kuwait pada usia empat tahun sampai ia berusia sembilan tahun. Kemudian, setelah sebentar kembali ke Indonesia, Fifi diboyong ke Islamabad, Pakistan, sampai menyelesaikan SLTA di sana.

Setelah itu, balik lagi ke Jakarta dan meneruskan studi di Universitas Trisakti hingga sekarang. Sedangkan ibunya, adik (Heikel) dan ayahnya yang pejabat Deplu itu sejak dua tahun lalu sampai sekarang di Moskwa karena menjabat Kepala Bidang Ekonomi Kedubes RI di sana.

Sementara Fifi tinggal bersama adiknya (Gusman) mahasiswa teknik mesin di Universitas Trisakti, di kawasan Pasar Minggu. "Biasanya kita tidak pernah pisah. Tapi karena waktu itu Fifi kuliahnya lagi tanggung, ya terpaksa *nggak* ikut," kata Fifi yang merasa berkesan ketika tinggal di Kuwait. Karena negara itu dekat dengan Kota Mekkah, Fifi ketika berusia 9 tahun dibawah umroh selain jalan-jalan ke Irak dan negara-negara di sekitarnya.

Berpisah tempat tinggal dengan mama dan papa, bukan berarti membuat Fifi tidak bisa mandiri. Sebab, bersikap hidup mandiri, atau paling tidak, bisa mengambil keputusan sendiri, sudah ditanamkan di keluarga itu sejak masih kecil.

Ambil contoh, soal pendidikan dan kegiatan diserahkan kepada masing-masing anak. "Papa *nggak* pernah memaksa kita mau ambil jurusan apa. Paling papa cuma memberi usulan dan pertimbangan-pertimbangan. Soal minat, kita diberi kesempatan untuk memutuskannya," kata Fifi.

Fifi menganggap orang tuanya memberi kepercayaan kepada anak-anak. Tapi dibalik itu, kata Fifi, sesungguhnya orang tua memberinya tanggung jawab. "Jadi, jangan sampai kita menyalagunakan kepercayaan yang sudah diberikan itu," tegas Fifi.

Sekalipun sehari-harinya berkecukupan, Fifi mengaku tak dimanjakan dengan uang oleh orang tuanya. "Pokoknya saya menjadi begini berkat dibentuk oleh lingkungan keluarga," kata Fifi yang mengucap terima kasih kepada kedua orang tuanya atas didikannya selama ini. Soal *boy friend, off the record*, ah," ngeles Fifi dengan ramah. **(Dji)**

HJ. Toetty Soelasminiaty

Ikut berkiprah membina Kota Jasa yang TEGUH BERIMAN.

USIANYA setengah baya. Namun H. Toetty Soelasminiaty masih fit. Tampak lebih muda dari usia sebenarnya yang kini genap 52 tahun.

Wanita kelahiran Magelang 27 Agustus 1943 ini, masih sibuk memimpin berbagai organisasi dan lembaga sosial. Dia tipe wanita aktif, wanita karir yang berjiwa sosial.

Banyak usaha yang dikelolanya. Ia membuka salon kecantikan, mengelola Rumah Sakit, Kursus Ketrampilan komputer, Bimbingan Test. Bahkan urusan Rumah Ibadah Masjid Al-Afiat dibangunnya dengan biaya Rp. 100 juta di Kampung Jagoan, Magelang, Jawa Tengah.

Di bawah ini hasil wawancara ***Media Jaya*** dengannya mengenai kiat suksesnya. Pendapatnya tentang Jakarta sebagai kota kelahirannya kedua setelah Magelang, juga diungkapkannya.

MEDIA JAYA (MJ) : "Selama ini, saya lihat Ibu Hj. Toetty Soelasminiaty sebagai wanita karir begitu sibuk mengurusi usahanya. Namun ternyata masih sempat mengurusi kegiatan sosial serta mengurus Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) Pusat Kursus Keterampilan Komputer, mengelola Rumah Sakit dan Salon.

Bagaimana Ibu mengatur waktunya, hingga semua bisa tertangani dengan baik.

Hj. Toetty Soelasminiaty (HTS) : *Bagaimana ya. Kita ini kan diberikan akan, pikiran dan iman oleh Allah SWT. Untuk mengatasi segala macam kegiatan itu, sebenarnya tergantung bagaimana kita mengatur waktunya. Jangan sampai diatur waktu.*

Jika pekerjaan itu kita susun secara sitematis, semuanya akan bisa diatasi. Kuncinya memang berada di tangan kita sendiri.

Jika kita tak pintar-pintar mengatur waktu, pasti kedodoran. Seperti orang yang hidup dan membuka usaha di Jakarta, memang harus dituntut bisa membagi waktu seefisien mungkin. Saya tidak

mengenal istilah waktu adalah uang, namun saya mencoba memanfaatkannya sebaik-baiknya.

Gunakanlah waktu itu seefisien mungkin dalam berusaha. Insya Allah, kalau niat kita baik, Allah SWT pasti akan mengabulkan permintaan umat-Nya.

Jangan lupa berbagi rasa dengan umat lainnya yang sangat membutuhkan. Misalnya penyadang sosial, yatim piatu dan sebagainya. Toh, harta yang kita miliki hanya titipan dari Allah SWT.

MJ : Pada 1995 ini, kalau tidak salah ibu sibuk sekali mengikuti berbagai acara kewanitaan ke berbagai negara. Terakhir ibu ikut ambil bagian dalam Kongres Wanita Sedunia (Non Goverment Organizational Congres (NGO) di Beijing, Republik Rakyat Cina (RRC).

Lalu siapa pemegang kendali perusahaan atau lembaga yang Anda pimpin. Misalnya dalam acara penting ke Australia, Eropa, Jerman, Belanda, Bangkok, Korea, Filipina dan lain sebagainya.

HTS : *Kalau sebuah perusahaan itu sudah dikondisikan sebagai perusahaan profesional, rasanya memang takkan menghadapi hambatan. Mengingat karyawan kita juga telah dikondisikan*

Hj. Toetty Soelasminiaty (paling kiri) foto bersama Dra. Titie Said Sadikun dan Dubes RI di Korea Selatan, Singgih bersama isteri ketika Kongres Wanita Sedunia di Beijing, RRC.

menjadi karyawan profesional.

Pendelegasian kerja sistematis ke seluruh karyawan, merupakan kunci utama berhasilnya suatu usaha. Mereka sebagai aset perusahaan, juga harus mempunyai loyalitas. Saya menganggap karyawan merupakan aset perusahaan yang tak ternilai harganya.

Karenanya, kita juga harus menghargai jerih payahnya secara layak dan merangkulnya secara kekeluargaan. Kalau kehilangan mereka, toh, perusahaan takkan berhasil.

MJ : Dahulu, sewaktu masih duduk di bangku SLTP hingga SLTA, ibu aktif menulis puisi dan cerpen. Apakah kegiatan itu masih dilakukan hingga sekarang? Dan bagaimana posisi Anda sebagai bendahara ikatan Wanita Penulis Indonesia (WPI) dan bergabung dengan KOWANI serta bergabung dengan para penulis terkemuka seperi La Rose, Titie Said Sadikun, Titiek WS dan lain-lainnya.

HTS : Jiwa seni saya memang masih menggebu-gebu. Tapi karena kesibukan saya sehari-hari, maka kegiatan itu agak terhambat. Bukan berarti saya melupakannya. Hanya masalah waktu yang sering berbenturan.

Rasanya ingin mengulangi kebiasaan pada masa remaja dahulu. Rasanya masih bergairah untuk tulis-menulis. Adakalanya, setelah usaha melakukan ibadah, ada ilham untuk menulis, namun jumlahnya tak begitu banyak.

Kalau untuk kegiatan sosial, saya mencoba untuk tetap aktif mengamalkannya.

Ini kepentingan bersama dunia-akhirat. Jika setiap tahun kami mengirimkan jemaah haji, itulah salah satu wujud dari kepedulian saya untuk melaksanakan perintah Allah SWT.

Tahun 1994 lalu, memang hanya tujuh orang jemaah haji yang kami tanggung berangkat ke Tanah Suci Mekkah dan tahun 1995 hanya lima orang. Insya Allah, jika Tuhan memberikan saya rizky yang baik tahun berikutnya bisa membiayainya lebih